

PENANGANAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERHADAP KEBERADAAN TUNA WISMA DI SURABAYA MASA WALIKOTA MOEHADJI WIDJAJA (1980-1984)

A'AN ADITYA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: thepensioner224@gmail.com

Corry Liana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kota Surabaya sebagai salah satu kota dengan berbagai kemajuan menjadi daya tarik para migran dari berbagai daerah akibat dari kesenjangan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk kota Surabaya pada masa Orde Baru. Kepadatan penduduk di Kota Surabaya dari hasil sensus penduduk pada kurun waktu 1971-1980 menunjukkan kenaikan dari 8.593 jiwa menjadi 10.047 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Surabaya kian bertambah jumlahnya diakibatkan adanya arus migrasi kedatangan para migran yang masuk ke Kota Surabaya. Para migran yang bermaksud mencari kehidupan yang layak dengan memiliki pekerjaan, nyatanya mengalami ketidakberuntungan dikarenakan kalah bersaing dengan individu lain yang lebih kompetitif mengenai perebutan perihal pekerjaan di kota yang persaingannya lebih ketat. Permasalahan tersebut merupakan faktor determinan yang memunculkan kaum Tuna Wisma.

Masifnya keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya pada akhirnya menjadi masalah yang menimbulkan kerumitan bagi pihak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera diselesaikan. Pemerintah Kota Surabaya yang notabene sebagai garda terdepan pemecah masalah tersebut melakukan berbagai upaya penanganan untuk mengurangi dan mencegah munculnya Tuna Wisma perlu dilakukan

Dari uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penulisan adalah (1) Bagaimana latar belakang penanganan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap keberadaan Tuna Wisma di Surabaya tahun 1980? (2) Bagaimana upaya penanganan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani keberadaan Tuna Wisma di Surabaya tahun 1980-1984? (3) Bagaimana kendala-kendala dan dampak sosial, ekonomi dan psikologis dari penanganan Pemerintah Kota Surabaya terhadap keberadaan Tuna Wisma di Surabaya?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya berupa upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitatif. Berbagai upaya tersebut mampu mengurangi keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya dan mampu memberikan dampak positif berupa kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para Tuna Wisma, sehingga Tuna Wisma mampu menjadi bagian dari suatu masyarakat kota Surabaya yang tidak lagi termarginalisasi.

Kata Kunci: Kota Surabaya, Migrasi, Tuna Wisma, Pemerintah Kota Surabaya

Abstract

Surabaya as one of the improvement cities become an appeal of migrants from different regions. It is the result of a developmental discrepancy leading the increasing population in the New Order era. According to the census conducted in 1971-1980, population was increasing from 8593 to 10.047 people. Population density in Surabaya has been growing due to the current migration in the city. Migrants come to Surabaya to looking for a job and a better life. In fact, they are being eliminated by more competitive individuals due to a job requirement. This is the determinant factor that leads to the existence of homeless people.

The massif of homeless people in Surabaya will eventually become a complex problem who needs to be resolved by the government. Surabaya's government as the first part to solve this problem make the variety of efforts are needed to reduce and to prevent the existence of homeless people in Surabaya.

From the background explanation, the writer in this study will be investigating the issues of (1) How is the handling background of Surabaya's government toward homeless people in 1980? (2) How are the efforts of Surabaya's government in handling homeless people's existence in the year between 1980-1984? (3) How are the obstacles emerged in social, economic, and psychology regarding the efforts of Surabaya's goverment toward homeless people in that city?

This study used historical methodology that consists of four stages which are heuristic, critics, interpretation and historiography. The data sources are collected from The Library and Archives of Surabaya and Stikosa AWS's library. The second stage is to conduct internal criticism for assessing the validity of the source used. Interpretation is used to set of resources that are more meaningful from each other to examine the history of which is related to the issue. The writer then used historiography to present the result of a research report and to make sure the writing is correct and appropriate. The result of this study showed Surabaya's government attempted to the kinds of efforts are preventive, repressive, and rehabilitative. The kinds of efforts give a positive impact such as social and economic welfare and reduce the existence of homeless people in Surabaya. Thereby, homeless people are able to be a part of Surabaya's society who no longer marginalized.

Keywords: Surabaya, Migration, Homeless, Surabaya's government

PENDAHULUAN

Negara Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno telah banyak memunculkan sejarah dalam aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satunya dapat terlihat ketika pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno pernah menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin. Dalam pelaksanaan konsep Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat dan akhirnya menjurus pada sistem Ekonomi Etatisme¹. Sistem ekonomi tersebut menimbulkan penurunan ekonomi dengan adanya tingkat inflasi yang tinggi mencapai lebih dari 300%, sehingga membuat konstelasi ekonomi Indonesia cenderung mengalami krisis ekonomi dan mengalami defisit saldo neraca pembayaran dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kian membesar dari tahun ke tahun. Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata pertahun selama periode 1960-1965 sekitar 151 juta rupiah, sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah rata-rata pertahun sekitar 359 juta rupiah atau dapat dikatakan lebih dari 100% dari besar rata-rata pendapatan². Konsep sedemikian rupa juga menimbulkan dampak lain berupa tingginya tingkat inflasi yang sampai akhir tahun 1965 mencapai 650%. Indonesia pada tahun 1965 adalah termasuk di antara tingkat perekonomian yang rendah di dunia dengan saham perdagangan yang rendah dalam GDP, namun memiliki sebuah sektor pertanian yang sangat besar dan sebuah industri manufaktur yang sangat kecil³.

Ketika Negara Indonesia mengalami permasalahan terkait penurunan kondisi ekonomi, pihak Pemerintah Indonesia secara bersamaan juga melakukan upaya

restorasi terhadap kondisi Indonesia tersebut. Upaya tersebut ialah melaksanakan program yang diberi nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969. Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana delapan tahun (1961-1969) tersebut merupakan pembangunan tahap pertama yang nasional, semesta berencana dan berisikan tripola untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan rohaniyah dan jasmaniah yang sehat dan kuat serta pembangunan tata perekonomian dan kebudayaan Indonesia yang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotong royong⁴. Namun pada akhirnya Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961-1969) yang telah disusun oleh ketua MPRS dan diresmikan oleh Presiden Soekarno dalam pelaksanaannya dirasa kurang mencapai hasil yang efektif. Program pembangunan tersebut menyebabkan adanya fenomena baru yaitu adanya kesenjangan pembangunan antara daerah kota dengan desa, seperti pada penulisan Racmat Jumali dikatakan bahwa:

“Disamping itu adanya ketimpangan pembangunan dari aspek wilayah, dimana sebagian wilayah mengalami kemajuan dan sebagian wilayah lain masih tertinggal, menimbulkan urbanisasi yang besar-besaran dan secara bersamaan terus-menerus terjadi sejak periode akhir tahun 1950-an hingga sepanjang pertengahan tahun 1960-an di seluruh Indonesia”⁵.

Oleh karena itu program Pembangunan Semesta Berencana sebagai salah satu proses modernisasi menimbulkan adanya perbedaan kemajuan antara desa-kota, sehingga desa dirasa tidak memiliki potensi untuk menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi masyarakatnya hingga pada akhirnya terjadi proses migrasi

¹ Sistem Etatisme dalam mana Negara beserta aparaturnya ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara

² Mas'ood Mochtar.1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Jakarta: LP3S, hlm: 6

³ Jan Luiten van Zanden, Daan Marks, 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Kejayaan Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia, hlm: 342

⁴ “Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Rep. Indonesia No. II/MPRS/1960”, *Surabaya Post*, 6 Desember 1960 Tahun ke-VIII No. 105, hlm: 2

⁵ Rachmat Jumali. 2014. *Wong Mbambung Surabaya 1966-1975*, (Online), AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 2, No. 3, Oktober 2014 <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/tag/9166/wong-mbambung>. Diunduh pada 30 Desember 2015, hlm: 551

penduduk desa ke kota besar di Indonesia. Negara Indonesia yang notabene sebagai negara agraris dengan proses kegiatan industrialisasi yang masih terbatas menciptakan perubahan besar berupa keinginan penduduk pedesaan ke arah budaya kota dikarenakan cepatnya kemajuan informasi kehidupan perkotaan. Namun proses modernisasi tersebut kurang terjadi di daerah pedesaan yang artinya yaitu desa kurang dikembangkan sehingga menimbulkan adanya daya tarik penduduk desa ke kota. Oleh karena itu produk dari adanya pembangunan sebagai proses modernisasi tersebut adalah munculnya sebuah proses migrasi antara desa dan kota. Proses tersebut dikenal dengan *pull ad push factors*, mengakibatkan *l'exode rurale* (migrasi besar-besaran dari desa) ke kota besar.⁶

Pada masa Orde Baru, Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan berbagai kemajuan dan menjadi daya tarik para migran dari berbagai daerah yang menimbulkan peningkatan jumlah penduduk kota Surabaya. Peningkatan tersebut juga berasal dari banyaknya migran yang masuk ke Surabaya. Masifnya keberadaan para migran yang memilih bertahan hidup di Kota Surabaya dengan berbagai cara akhirnya memicu munculnya permasalahan sosial perkotaan mengenai kemunculan Tuna Wisma atau Gelandangan di kota Surabaya. Gelandangan atau Tuna Wisma merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota untuk makan, minum dan tidur di sembarang tempat. Istilah Gelandangan pada umumnya merujuk pada orang-orang migran yang bertempat tinggal di perkotaan, tetapi secara kultural tidak diterima sebagai bagian dari masyarakat. Di Surabaya, para gelandangan disebut dengan istilah *wong bambung*, sedangkan dalam bahasa resmi pemerintah disebut sebagai Tuna Wisma.⁷

Keberadaan Tuna Wisma memunculkan dampak destruktif berupa kemunculan permukiman liar dan kumuh. Fenomena keberadaan Tuna Wisma tetap selalu melekat dan menyatu dengan Kota Surabaya yang notabene mengalami proses modernisasi berupa adanya pembangunan perkotaan yang sangat pesat. Penanganan dengan berbagai upaya untuk memecahkan masalah sosial perkotaan mengenai keberadaan Tuna Wisma menjadi tugas tersendiri bagi Pemerintah Kota Surabaya, sehingga Tuna Wisma yang merupakan juga salah satu bagian suatu

elemen masyarakat kota tidak lagi mengalami marginalisasi dan juga diharapkan mendapatkan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil judul “Penanganan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya Masa Walikota Moehadji Widjaja (1980-1984)” sebagai bahan penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara sistematis. Hal ini dimaksudkan agar penelitian mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Dalam usaha untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu penulis menggunakan metode penulisan sejarah yang meliputi tahap heuristik, tahap kritik, tahap interpretasi dan tahap historiografi.⁸

Langkah awal yaitu heuristik atau pengumpulan sumber yaitu suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber, data-data, atau jejak-jejak sejarah. Sejarah tanpa sumber maka tidak bisa bicara. Maka sumber dalam penelitian sejarah merupakan hal yang paling utama yang akan menentukan bagaimana aktualitas masa lalu manusia bisa dipahami oleh orang lain.

Sumber sejarah yang dikumpulkan adalah sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas, antara lain berupa sumber primer dan sekunder. Sumber Primer merupakan Arsip Kota Surabaya pada kurun waktu 1980-1984 mengenai program-program pemerintah menangani keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya yang diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, kemudian sumber berupa surat kabar *Surabaya Post* dan majalah *Sketmasa* terkait pemberitaan mengenai keberadaan Tuna Wisma dan pelaksanaan program pemerintah mengenai keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya pada tahun 1980-1984 yang diperoleh dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya dan Perpustakaan AWS Stikosa Surabaya. Sumber sekunder diperoleh dari Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Kota Surabaya dan Perpustakaan Daerah Surabaya diantaranya: Sugiono Soetomo dengan judul *Urbanisasi dan Morfologi Proses Perkembangan Peradaban & Wadah Ruang Fisiknya: menuju ruang kehidupan yang manusiawi*, Michael Todaro dengan judul *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jan Luiten van Zanden, Daan Marks dengan judul *Ekonomi Indonesia 1800-2010* serta Chris Manning

⁶ Sugiono Soetomo. 2009. *Urbanisasi dan Morfologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm: 164

⁷ Lucy Dyah Hendrawati. 2005. *Identifikasi Masalah Dan Kendala Penanganan Pengemis dan Gelandangan Di Surabaya*. Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, hlm: 25

⁸ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*, Surabaya: University Press, hlm: 10-11

dan Tadjudin Noer Effendi dengan judul *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal*. Sumber-sumber sekunder tersebut diharapkan dapat menambah informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Langkah kedua yaitu kritik sumber adalah suatu kegiatan untuk meneliti sumber-sumber yang diperoleh agar memperoleh kejelasan apakah sumber tersebut autentik atau tidak. Pada proses ini dalam metode sejarah biasa disebut dengan istilah kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sejarawan untuk melihat apakah sumber tersebut cukup kredibel atau tidak, sedangkan kritik ekstern adalah kegiatan sejarawan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan autentik atau tidak.

Pada kritik sumber atau tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan, dan memilah sumber-sumber yang berisi tentang informasi sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu informasi mengenai sejarah, khususnya mengenai Penanganan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya (1980-1984). Kritik sumber pada arsip terkait kebijakan pemerintah Kota Surabaya mengenai Tuna Wisma yang diperoleh dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, penggunaan sumber tersebut merupakan hal terpenting dalam penelitian dikarenakan sajian data merupakan data yang kredibel dan autentik. Sumber berupa berita dari kabar *Surabaya Post* tahun 1960 mengenai munculnya program Pembangunan Semesta Berencana pada masa Orde Lama dirasa relevan dengan bahasan penelitian. Pembahasan dari majalah *Sketmasa* mengenai munculnya Tuna Wisma di Kota Surabaya pada masa Orde Lama dapat digunakan dalam penelitian sebagai dasar untuk menemukan konsep berpikir dalam melakukan penelitian Penanganan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya Masa Walikota Moehadji Widjaja (1980-1984).

Terdapat beberapa sumber sekunder terkait literatur-literatur penunjang seperti buku *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* oleh Gilbert Alan dan Josef Gugler, *Ekonomi Indonesia 1800-2010 antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* oleh Jan Luiten van Zenden dan Daan Marks, *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan* oleh Johan Silas, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* oleh Mas'ood Mochtar, *The New Structural Social Work: Ideology, Theory, Practice*. Oxford oleh Bob Mullaly, *Wong Mbambung Surabaya 1966-1975* oleh Rahmat Jumali, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (Suatu Studi)* oleh Soetrisno P.H, dan *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* oleh Todaro M.P, Stephen C Smith. Kritik

pada sumber-sumber tersebut membantu menemukan referensi terkait pembahasan penelitian, sehingga membantu dalam membangun kerangka berpikir mengenai penelitian "Penanganan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya (1980-1984)". Penggunaan sumber-sumber tersebut dirasa perlu karena menyajikan informasi yang kredibel dan autentik sebagai acuan dalam penelitian.

Langkah ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran, mencari hubungan antar fakta yang telah ditemukan kemudian menafsirkannya. Berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipilah penulis tentang, penulis mencoba untuk mencari keterkaitan antar fakta-fakta yang didapat dari sumber-sumber tersebut.

Langkah keempat yaitu menyusun atau merekonstruksi fakta-fakta yang telah tersusun yang didapatkan dari penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk tertulis yang berarti penyajian hasil laporan penelitian yang disusun secara kronologis dalam bentuk skripsi.

PERKEMBANGAN DAN KEBERADAAN TUNA WISMA DI KOTA SURABAYA MASA WALIKOTA MOEHADJI WIDJAJA TAHUN 1980-1984

A. Kondisi Ekonomi Kota Surabaya Tahun 1980

Pada masa Orde Baru, Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di lingkup Negara Indonesia yang menjadi lokasi diterapkannya program pembangunan negara yaitu Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada salah satu pelaksanaan Program Pelita, yaitu Pelita III (1979-1984). Program Pembangunan Lima Tahun tersebut berorientasi mengenai pemerataan pembangunan agar hasil-hasilnya mengarah pada terwujudnya keadilan sosial. Kota Surabaya sebagai obyek merasakan dampak dari pelaksanaan program tersebut, implikasinya terlihat pada berkembangnya sektor industri, perdagangan, maritim dan pendidikan atau yang biasa disebut Indamardi. Perkembangan dari berbagai bidang tersebut diharapkan dapat membantu pembangunan dan pengembangan Kota Surabaya.⁹

Perkembangan dari berbagai sektor di Kota Surabaya, secara langsung berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Nyatanya Kota Surabaya menjadi tujuan sejumlah masyarakat pedesaan untuk melakukan perpindahan atau migrasi. Hal tersebut diperlihatkan saat memasuki globalisasi pada awal tahun

⁹Surabaya Dalam Lintas Pembangunan, (Sub Bagan Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980), hlm: 49

1980 yang menunjukkan keberadaan sentral industri di Rungkut, serta adanya Pelabuhan Tanjung Perak yang juga menjadi daya tarik negara asing untuk berinvestasi dan sebagai pusat produksi. Keadaan sedemikian rupa juga membuat kehadiran pendatang di Kota Surabaya semakin bertambah pesat, sehingga nantinya berdampak pada jumlah pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk secara tidak alami di Surabaya selain faktor alami yang berupa kematian dan kelahiran. Kota Surabaya pada masa Orde Baru termasuk kota yang juga berkembang pada sektor perdagangan. Pada tahun 1980, Kota Surabaya merupakan barometer perdagangan di lingkup Jawa Timur. Penduduk Surabaya dengan jumlah 2,4 juta jiwa dengan luas wilayah 300.860 km² terdapat diantaranya sebanyak 154.327 jiwa yang berprofesi sebagai pedagang termasuk di pasar-pasar, pedagang kaki lima, pedagang keliling dan lainnya.¹⁰ Diperkirakan juga terdapat kurang lebih 15.000 orang pekerja pada sektor perdagangan yang terdaftar, termasuk pedagang kaki lima, pedagang keliling, kios-kios kecil dan pedagang minuman.¹¹

Pada tahun 1980 di Kota Surabaya mengalami kondisi ekonomi yang cukup dinamis berupa adanya kenaikan dan penurunan harga barang di pasaran. Terjadi kenaikan harga emas yang cukup tinggi hingga mencapai Rp.13.000 setiap gramnya. Kemudian juga terjadikenaikan kembali harga emas di Kota Surabaya sempat mencapai harga tertinggi yaitu Rp. 15.000 per gram. Kenaikan harga juga terjadi pada harga barang kebutuhan pokok di Kota Surabaya, antara lain: beras, ikan asin, kain batik mori biru, gaplek tepung dan sayur mayor. Namun penurunan harga di Kota Surabaya juga terjadi, hal tersebut terjadi pada harga minyak goreng dan jagung. Juga terjadi kenaikan harga telur ayam yang cukup signifikan di Kota Surabaya.

Problematis mengenai kenaikan dan penurunan harga berbagai barang di Kota Surabaya merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi tertinggi di Kota Surabaya diantara kota-kota lain di Indonesia pada tahun 1980. Inflasi di Kota Surabaya disebabkan oleh kenaikan harga emas dan harga bahan-bahan pokok yang terjadi pasar-pasar Surabaya. Hal tersebut tidak terlepas dari status Kota Surabaya sebagai barometer perdagangan di Jawa Timur yang memberikan kontribusi dalam kenaikan laju inflasi di Kota Surabaya pada tahun 1980 mencapai 23,10 %,

sehingga angka tersebut merupakan angka tertinggi inflasi kota di Indonesia dibandingkan kota-kota besar lainnya.

B. Kondisi Sosial Kota Surabaya Tahun 1980

Keberagaman kemajuan berbagai sektor di Kota Surabaya berdampak secara simultan pada perkembangan kehidupan sosial Kota Surabaya. Hal tersebut terlihat pada tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya berupa tingginya tingkat urbanisasi serta pesatnya perluasan kota. Hal tersebut menyebabkan Kota Surabaya menjadi tempat yang ramai dan strategis untuk dikunjungi para kaum migran dari berbagai daerah untuk merubah nasib dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kota dianggap sangat menjanjikan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan.¹²

Salah satu hal masif yang menyebabkan penambahan jumlah penduduk di Kota Surabaya tahun 1980 ialah peristiwa urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu jalan (pergerakan) dari mentalitas pedesaan kota ke mentalitas kota dan dicirikan oleh pergerakan migrasi penduduk dari lokasi kecil pedesaan ke lokasi besar perkotaan.¹³

Kota Surabaya yang terkenal dengan sebutan kota Indamardi (Industri, Perdagangan, Maritim dan Pendidikan) mampu menarik perhatian golongan penduduk tertentu untuk datang dan menetap, terutama bagi golongan penduduk yang ingin mencari pekerjaan dan ingin melanjutkan pendidikan. Penampilan Surabaya yang semakin berkembang pada akhirnya menjadikan daya tarik tersendiri bagi para migran dari berbagai daerah untuk masuk ke Kota Surabaya. Layaknya kota-kota besar lain di Negara Berkembang, Kota Surabaya menerima konsekuensi dengan adanya peningkatan jumlah migran yang mencoba mengadu nasib di kota terbesar kedua di Indonesia tersebut. Serta juga mengakibatkan semakin tidak seimbangnya daya dukung kota dikarenakan penambahan jumlah migran yang sangat tinggi.

Kedatangan kaum migran dengan berbagai tujuan ke Kota Surabaya mengakibatkan semakin padatnya penduduk Kota Surabaya, sehingga hal tersebut secara tidak langsung juga berdampak pada ketatnya kompetisi untuk bertahan hidup antara sesama penghuni di Kota Surabaya. Konsekuensi pokok atas melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik di sektor

¹⁰"Surabaya Barometer Perdagangan di Jatim", *Surabaya Post*, 5 Juni 1980, hlm: 2

¹¹*Opit*, hlm: 62

¹² Freek Colombijn, dkk. 2005, *Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak, hlm: 31

¹³ Sugiono Soetomo.2009. *Urbanisasi dan Morfologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm: 42

formal maupun informal dalam perekonomian kota.¹⁴ Pada tahun 1980, gelombang pencari kerja di Kota Surabaya semakin bertambah jumlahnya. Gelombang pencari kerja dengan jumlah besar mencari kerja di kantor-kantor swasta dan pemerintah yang berada di Kota Surabaya¹⁵.

Semakin padatnya penduduk Kota Surabaya menyebabkan pula penyempitan lahan hidup bagi penduduk Kota Surabaya. Semakin menipisnya lahan hidup, menjadikan harga lahan atau ruang hidup relatif menjadi lebih tinggi. Bagi penduduk Kota Surabaya khususnya para pendatang yang tidak memiliki pekerjaan, hal tersebut membuat para pendatang tidak memiliki kesempatan bersaing untuk memiliki lahan hidup (rumah). Mayoritas para migran di Kota Surabaya tidak memiliki lahan hidup dikarenakan tidak memiliki pekerjaan, sehingga para migran yang tidak kompetitif tersebut termarginalisasi dari struktur dan lingkungan masyarakat Kota Surabaya. Pada tahun 1980, Peristiwa migrasi yang terjadi Kota Surabaya menimbulkan beberapa pengaruh, mulai dari memadatnya permukiman lama penduduk, memunculkan daerah-daerah baru dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Permasalahan sosial perkotaan mengenai dampak urbanisasi secara langsung menyinggung keberadaan Pemerintah Kota Surabaya sebagai garda terdepan pemecah masalah tersebut. Namun kenyataannya, pihak Pemerintah Kota Surabaya mengalami beberapa hambatan berupa kurangnya persiapan oleh pihak perencanaan dan pengendalian perkembangan dikarenakan terbatasnya kemampuan aparat dan kurangnya anggaran Pemda KMS.¹⁶ Hal mengenai urbanisasi di Kota Surabaya juga ditegaskan oleh Ir. Soedjarwo selaku Kepala Dinas Perencanaan Tata KMS dalam surat kabar *Surabaya Post*:

“Daerah permukiman lama semakin padat, ruang terbuka, kebun sayur, kuburan, lapangan bermain, tanah dan stren yang ada semua diduduki.

Urbanisasi itu juga menyerbu sawah, rawa-rawa dan semak belukar. Tanah dikeringkan, dipagari, didirikan tiang-tiang, dinding-dinding darurat, diatapi dan langsung dihuni. Dalam waktu singkat telah berubah menjadi bangunan tembok permanen.

Mereka tidak memperhatikan lagi tata lingkungan yang sehat, pokoknya dekat

dengan fasilitas kota. Mereka tidak memperdulikan rusak dan terganggunya saluran pematasan, jalan pengubung, taman-taman, lapangan terbuka, yang terpenting kebutuhan akan tempat tinggal tersedia. Ini adalah proses urbanisasi....”¹⁷

Secara general, peristiwa urbanisasi yang berlebihan di Kota Surabaya pada tahun 1980 menimbulkan berbagai fenomena sosial perkotaan, antara lain munculnya permukiman baru yang terkesan kumuh dan tidak sehat oleh kaum migran serta memadatnya permukiman-permukiman yang sudah terbentuk. Para kaum migran sebagai pelaku proses urbanisasi di Kota Surabaya memberikan dampak destruktif bagi Kota Surabaya, dikarenakan eksistensi kaum migran di Kota Surabaya terkesan memperburuk tatanan kota. Terlihat pada kehidupan para migran tersebut yang lebih memilih untuk mendirikan bangunan-bangunan semi-permanen bahkan permanen di daerah-daerah yang bersifat publik. Pihak Pemerintah Kota Surabaya sebagai instansi yang memberikan kontrol terhadap peristiwa urbanisasi tersebut mengalami hambatan dikarenakan terbatasnya kemampuan aparat terkait dan kurangnya anggaran Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.

C. Perkembangan dan Keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya Tahun 1980-1984

Fenomena tersebut adalah adanya migran yang bertahan hidup seadanya dikarenakan tidak memiliki pekerjaan. Sebagai salah satu contohnya para migran membangun permukiman liar semi-permanen yang berdekatan dengan fasilitas publik. Pola hidup migran yang sedemikian rupa nyatanya memicu kemunculan suatu kelompok sosial yang bernama Tuna Wisma. Kelompok migran yang berasal dari desa yang melakukan migrasi ke kota dikarenakan tidak memiliki penghasilan yang cukup dan sanak keluarga yang menampung, kemudian mendirikan bangunan liar di sekitar wilayah pusat kota berdekatan dengan tempat bekerja.¹⁸ Implikasi yang ditimbulkan dari tingginya jumlah keberadaan migran yang tidak memiliki tempat tinggal liar (ilegal) di zona-zona publik, memunculkan fenomena sosial yaitu munculnya kelompok Tuna Wisma.

Tuna Wisma di Kota Surabaya pada umumnya berasal dari kota-kota di sekitar Kota Surabaya, antara lain adalah Kota Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Kediri dan lain-lain yang ingin mencari pekerjaan di Kota Surabaya. Keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya memberikan kesan buruk terhadap pemandangan di Kota Surabaya. Pada

¹⁴ Todaro M.P, Stephen C. Smith. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm: 374

¹⁵ “Pelamar Meluap”, *Surabaya Post*, Kamis, 26 November 1980, hlm: 2

¹⁶ “Surabaya Kewalahan Mengatasi Urbanisasi”, *Surabaya Post*, Jum’at, 21 November 1980, hlm: 2

¹⁷ *Ibid*, hlm: 2

¹⁸ Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm: 8

umumnya, para Tuna Wisma membangun hunian di dekat fasilitas-fasilitas publik Kota Surabaya, antara lain stasiun kereta api, pinggiran sungai dan taman-taman kota. Tahun 1980, konsentrasi permukiman Tuna Wisma di Kota Surabaya terbanyak berada di daerah-daerah Surabaya Selatan, para Tuna Wisma disana bertempat tinggal di bekas stasiun tram Wonokromo dan mendirikan gubuk-gubuk liar di sekitar pintu air Jagir dekat Jalan Raya Ngagel.¹⁹

Memasuki kehidupan ekonomi Tuna Wisma di Kota Surabaya, pada umumnya Tuna Wisma di Kota Surabaya tetap memiliki keinginan untuk bertahan hidup dengan memiliki berbagai pekerjaan. Tuna Wisma di sekitar jalan Semarang Kota Surabaya melakukan aktifitas ekonomi jual-beli barang bekas seperti kertas, pecahan gelas, botol dan kaleng, kegiatan jual-beli dilakukan di tempat-tempat para Tuna Wisma tersebut tinggal.²⁰ Pola mata pencaharian Tuna Wisma di suatu daerah hampir memiliki keseragaman dengan Tuna Wisma di daerah lain, seperti terlihat pada permukiman Tuna Wisma terbesar di Surabaya yaitu daerah Wonokromo. Mayoritas Tuna Wisma di daerah Wonokromo mempunyai pekerjaan sebagai tukang becak dan mencari barang-barang bekas (kertas, pecahan beling, putung rokok, dsb). Para Tuna Wisma di daerah stasiun Waringin memiliki jenis pekerjaan yang cukup beragam. Posisi stasiun Waringin yang berdekatan dengan terminal Joyoboyo, membuat para Tuna Wisma terkadang mencari pekerjaan di daerah sekitar terminal Joyoboyo. Mayoritas para Tuna Wisma yang berada di terminal Joyoboyo memiliki pekerjaan sebagai makelar penumpang bemo atau Colt, atau yang biasa disebut "ngetek".²¹

Mata pencaharian Tuna Wisma di Kota Surabaya cukup memiliki keberagaman dan mayoritas adalah pekerjaan-pekerjaan informal, seperti menjadi pencari barang bekas, tukang becak dan makelar bemo. Pekerjaan-pekerjaan tersebut mayoritas dilakukan berdekatan dengan permukiman para Tuna Wisma. Pekerjaan-pekerjaan tersebut pada umumnya tidak perlu memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi, sehingga keadaan para gelandangan yang mayoritas memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah mayoritas memilih pekerjaan-pekerjaan tersebut. Namun mata pencaharian seperti pencari barang bekas, tukang becak dan makelar penumpang bemo yang terkesan sederhana dan

tidak mampu menghasilkan cukup banyak uang nyatanya menghasilkan penghasilan yang cukup besar bagi para Tuna Wisma, sehingga pekerjaan-pekerjaan ini dapat menjadi pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para Tuna Wisma.

Tuna Wisma di Kota Surabaya pada umumnya membangun permukiman liar di dekat zona-zona publik seperti Stasiun Trem Wonokromo, pinggiran rel kereta api Kenjeran, Sidotopo dan Tenggumung, stren Kali Undaan serta berada di Makam Tembok. Keberadaan Tuna Wisma dengan hunian-hunian liarnya memberikan dampak destruktif bagi wajah Kota Surabaya, sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu mengadakan upaya untuk menekan dan mengurangi keberadaan Tuna Wisma. Upaya konkret tersebut saat tanggal 31 Oktober 1980, dilaksanakan sensus khusus Tuna Wisma oleh Badan Pusat Statistik KotaMadya Surabaya.

Terlihat dengan diadakannya sensus khusus Tuna Wisma tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan Tuna Wisma di Surabaya cukup banyak. Pada tahun 1980 jumlah Tuna Wisma di Surabaya nyatanya mencapai 7.388 jiwa. Pemerintah Kota Surabaya perlu mengadakan tindakan solutif untuk memecahkan masalah sosial perkotaan tersebut, sehingga pada akhirnya mampu menyelamatkan wajah Kota Surabaya dan juga mengembalikan Tuna Wisma untuk kembali menjadi bagian dari suatu masyarakat yang juga turut andil dalam proses pembangunan banga dan negara.

PERKEMBANGAN DAN KEBERADAAN TUNA WISMA DI KOTA SURABAYA MASA WALIKOTA MOEHADJI WIDJAJA TAHUN 1980-1984

A. Usaha Preventif Menangani Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya Tahun 1980-1984

Usaha Preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya Tuna Wisma atau Gelandangan di dalam masyarakat, yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya kelompok masyarakat yang diperkirakan akan menjadi Tuna Wisma. Dalam pelaksanaan upaya preventif mengenai keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya terdapat beberapa badan atau instansi yang secara langsung menangani penanggulangan keberadaan Tuna Wisma dengan melakukan berbagai kegiatan dan upaya untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya usaha dalam mencegah potensi-potensi kemunculan Tuna Wisma di Kota Surabaya.

Dalam rentang waktu 1980-1984 melakukan berbagai upaya preventif. Berupa penyuluhan keterampilan kerja yang diberikan oleh pihak Pemerintah dan bahkan juga dari organisasi sosial masyarakat.

¹⁹ "Sensus Sudah Mencapai Sepertiga Penduduk Jatim: Khusus Gelandangan 31 Oktober Tengah Malam, *Surabaya Post*, 2 Oktober 1980, hlm: 2

²⁰ "Jl. Semarang Dikotori Gubuk Gelandangan, *Surabaya Post*, 13 September 1980, hlm: 2

²¹ *Ngetek* adalah istilah lain untuk jenis pekerjaan menjadi makelar penumpang pada terminal

1. Penyuluhan Keterampilan Kerja oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Organisasi Sosial

Upaya preventif yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Surabaya dalam mencegah potensi kemunculan Tuna Wisma di Kota Surabaya adalah memberikan wadah (pekerjaan) bagi para pengangguran yang berada di Kota Surabaya. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, namun belum mampu memperoleh pekerjaan.²² Dalam artian lain adalah pengangguran memiliki arti luas, yaitu penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Lembaga dan organisasi masyarakat di Kota Surabaya juga melakukan berbagai penyuluhan keterampilan untuk para pengangguran yang berpotensi menjadi Tuna Wisma. Di Kota Surabaya, Pendidikan Keterampilan tersebut dilakukan oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan, KNPI, FBSI dan Asosiasi Latihan Keterampilan (ASKIL), pihak-pihak tersebut bekerja sama dalam rangka membantu para pengangguran-pengangguran yang berada di Kota Surabaya untuk menjadi tenaga terampil.

Berbagai penyuluhan keterampilan terhadap para penganggur dilaksanakan karena di Kota Surabaya dikarenakan masifnya kemunculan penganggur yang jumlahnya semakin meningkat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua bidang Pendidikan Kadin Jatim, Drs. Asmoro Hadikumuro dalam surat kabar *Surabaya Post*:

“Dikemukakan ide itu muncul disebabkan semakin meningkatnya pengangguran dewasa ini. Tujuannya untuk memberikan ketrampilan yang standar sesuai apa yang diminta oleh banyak pengusaha ataupun pemerintah”.²³

Program berupa upaya penanganan terhadap para penganggur di Kota Surabaya nyatanya juga diberikan kepada para penganggur dengan berbagai latarbelakang, salah satunya adalah perhatian terhadap pengangguran eks Narapidana. Keberadaan penganggur dari latarbelakang eks Narapidana di Kota Surabaya menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Saran pemberian perhatian oleh Pemerintah terhadap keberadaan eks narapidana juga dituturkan oleh Komisariss Peradin Pusat dalam *Surabaya Post*:

“Untuk menyalurkan bekas Napi yang baru keluar LP, merupakan kewajiban Pemerintah untuk memikirkannya. Pemerintah Daerah, seharusnya cepat tanggap, bagaimana menyalurkan mereka, agar tak mengulangi lagi perbuatan silamnya. Saran Pamoedji, beri mereka misalnya pendidikan ketrampilan”.²⁴

B. Usaha Represif Menangani Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya Tahun 1980-1984

1. Operasi Penertiban Tuna Wisma

Pada tahun 1980 ketika Kota Surabaya dibawah kepemimpinan Walikota Moehadji Widjaja, program Operasi Tri Tuna tetap dilaksanakan sebagaimana seperti yang diterapkan pada masa kepemimpinan Walikota Soeparno. Beberapa situasi perihal keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya yang menjadi alasan diadakannya Operasi Tri Tuna tersebut, antara lain: (1) pelaksanaan operasi tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan, masih banyak terlihat keberadaan Tuna Wisma di jalan-jalan Kota Surabaya; (2) masih sering dijumpai adanya gubuk-gubuk liar, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Keberadaan Tuna Wisma tersebut banyak dijumpai di daerah sekitar jalan Wonokromo dan daerah sekitar jalan Perak, sehingga pelaksanaan operasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya.

Pada tahun 1981, di Kota Surabaya pelaksanaan usaha represif untuk menanggulangi keberadaan Tuna Wisma berupa operasi atau razia yang bernama Operasi Tri Tuna (Tuna Karya, Tuna Wisma dan Tuna Susila) tetap dilaksanakan. Operasi Tri Tuna dilaksanakan atas dasar instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, nomor: 05/1981 tanggal, 24 September 1981 mengenai pelaksanaan operasi Tri Tuna di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Latar belakang pelaksanaan operasi tersebut dikarenakan beberapa sebab, antara lain: (1) Operasi Tri Tuna (Tuna Karya, Tuna Wisma dan Tuna Susila) kurang memberikan hasil, keberadaan Tri Tuna tidak berkurang; (2) Banyak dijumpai gubuk-gubuk liar yang berada disepanjang sungai Kalimas dan berbagai tempat lainnya; (3) Adanya pengemis-pengemis di jalan

²² Sukirno, Sadono. 2000. " Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru". Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm: 8

²³ *Opcit*, hlm: 2

²⁴ "Perlu Pendekatan, Prems dan Bakotas", *Surabaya Post*, 3 Februari 1982, hlm: 2

Protokol dan beberapa Perempetan yang mengganggu ketertiban umum.²⁵

2. Operasi Penertiban Bangunan Liar Tuna Wisma

Upaya represif berupa penertiban bangunan-bangunan liar Tuna Wisma dilaksanakan di perlintasan kereta api wilayah Tandes. Pada tahun 1983, keberadaan bangunan liar milik Tuna Wisma mencapai sekitar 330 bangunan, jumlah tersebut menunjukkan jumlah bangunan-bangunan liar berdekatan dengan area PJKA di Kota Surabaya relatif banyak terletak di Wilayah Tandes. Soedarman selaku Humas PJKA Eksplotasi Timur pada *Surabaya Post* menegaskan, pada bulan Maret-Mei 1983 operasi penertiban bangunan-bangunan liar sementara diberhentikan. Hal tersebut diberlakukan karena mencegah timbulnya keresahan masyarakat dalam menghadapi Pemilu (Pemilihan Umum), tetapi operasi penertiban akan dilanjutkan setelah Pemilu selesai dilaksanakan. Pelaksanaan penertiban bangunan-bangunan liar di jalur kereta api wilayah Tandes dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pihak PJKA dengan Pihak Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Pembantu Walikota Wilayah Surabaya Utara.²⁶

Masifnya bangunan-bangunan liar yang didirikan oleh Tuna Wisma, membuat Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan upaya represif dalam rangka mengurangi keberadaan Tuna Wisma di Surabaya. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi pada masa pemerintahan Walikota drs. Moehadji Widjajaja adalah adanya pembongkaran bangunan-bangunan liar di sepanjang kali Asem Rowo – Greges (September 1982 - Oktober 1982), karena bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki ijin bangunan serta menyebabkan kawasan sekitarnya menjadi banjir.

C. Usaha Rehabilitatif Menangani Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya Tahun 1980-1984

1. Pemberian Keterampilan Bagi Tuna Wisma dan Pengikutsertaan Program Transmigrasi Bagi Tuna Wisma

Perencanaan usaha Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan upaya rehabilitatif bagi Tuna Wisma telah dilakukan pada bulan Desember 1979. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melakukan kerja sama dengan Kantor Wilayah Ditjen Bina Guna

DEPNAKERTRANS (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Provinsi Jawa Timur untuk melakukan usaha lanjutan tersebut. Usaha Rehabilitatif tersebut merupakan upaya pemberian latihan keterampilan jurusan “Tukang Batu” bagi 20 orang Tuna Wisma yang berada di Asrama Bapertukda di Dukuh Kupang Surabaya yang dilaksanakan awal Januari 1980 dengan estimasi waktu pelaksanaan selama dua bulan.²⁷

Pada tahun 1982, tiap bulan rata-rata 50 kepala keluarga telah diberangkatkan ke luar Jawa sebagai transmigran, atau diberi keterampilan sebagai petani dan sebagai tukang kayu atau besi. 1 Desember 1982 di Asrama Bapertukda Ngesong telah diberangkatkan 25 Kepala Keluarga terdiri 147 jiwa sebagai transmigran untuk ditempatkan di Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Dua hari sebelumnya juga telah diberangkatkan sekitar 25 Kepala Keluarga terdiri 131 jiwa ke daerah transmigrasi Malonas, Donggala Sulteng. Para peserta tersebut sebelumnya merupakan penghuni gubuk di tepi rel kereta api di sekitar PT Barata Ngagel.²⁸

2. Pengadaan Program Wajib Belajar Bagi Tuna Wisma

Program Wajib Belajar bagi anak-anak di Kota Surabaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Surabaya mengupayakan Wajib Belajar pula bagi anak-anak Tuna Wisma. Bekerja sama dengan Wargo Lelono, Bagian Kesejahteraan Rakyat mendata jumlah anak yang diwajibkan untuk mengikuti program Wajib Belajar di kalangan Tuna Wisma. Pendataan tersebut dilakukan di 17 lokasi penampungan Tuna Wisma dan mendapatkan 26 anak usia 7 hingga 12 tahun yang bersedia untuk belajar. Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, drs Alie Prajitno dalam *Surabaya Post*:

“Anggota Wargo Lelono di kawasan Tambak Mayor dan Sukomanunggal akan dijadikan proyek percontohan program Wajib Belajar untuk Tuna Wisma di Surabaya. Jumlah penghuni sekitar 425 jiwa, sepertiganya anak-anak. Yang bersekolah memang ada, namun jumlahnya sedikit”.²⁹

²⁵ Arsip Kota Surabaya Nomor: 63.843/ Box: 1707, mengenai Instruksi Walikotamadya tentang Pelaksanaan Operasi TRI TUNA di wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya

²⁶ “Rumah Sepanjang Rel Segera Ditertibkan”, *Surabaya Post*, Jum’at, 1 Oktober 1982, hlm: 2

²⁷ Arsip Kota Surabaya Nomor: 47.481/ Box: 864.866, mengenai pengajuan bantuan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bina Guna DEPNAKERTRANS Propinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan Kursus Keterampilan Tukang Batu untuk Tuna Karya

²⁸ “Jumlah Gelandangan Direm”, *Surabaya Post*, Kamis, 2 Desember 1982, hlm: 2

²⁹ “Anak-anak Tuna Wisma Didata”, *Surabaya Post*, Sabtu, 5 Mei 1984, hlm: 2

3. Lokalisasi Penampungan Khusus Tuna Wisma dan Pengikutsertaan Tuna Wisma Transmigrasi Oleh Wargo Lelono

Pada perkembangannya Wargo Lelono telah memiliki 18 transito bagi Tuna Wisma, antara lain di emplasemen PJKA, Stasiun Semut, Stasiun Wonokromo, Stasiun Gubeng, Stasiun Pasar Turi, Stasiun Sidotopo, Stren Kayoon, Genteng Kali dan Jalan Irian Jaya, kolong Jembatan Jagalan, Sonokembang, Walikota Mustajab dan Pemuda, depan Pasar Atom, belakang Makam Tembok Dukuh dan Karang Tembok dan sekitar Jalan Simpang Dukuh. Lokasi transito tersebut masing-masing dipimpin oleh satu orang, guna mengkoordinasi, mengawasi dan membimbing para Tuna Wisma.³⁰

Pada tahun 1983, sekitar 40 KK telah diberangkatkan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran bagi Tuna Wisma untuk tidak lagi hidup menggelandang, Wargo Lelono melakukan beberapa pendekatan dan memberikan motivasi secara intensif. Wargo Lelono juga membentuk Tuna Wisma untuk menjadi warga perkampungan. Sekitar 500 Tuna Wisma menjadi warga Kota Surabaya, dengan membentuk kampung-kampung di sekitar Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Tandes (sekitar daerah Asemrowo).

4. Kendala-kendala Dalam Upaya Menangani Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya Tahun 1980-1984

Dalam rentang waktu 1980-1984 mengenai pelaksanaan upaya penanganan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Adanya orang yang menjadi dermawan bagi para Tuna Wisma yang menjadi pengemis. tindakan para dermawan cukup membantu, namun hanya bersifat sementara. Tindakan memberi dirasa kurang edukatif dan hanya akan merusak mental pengemis dengan tidak memiliki lagi semangat merubah nasib dengan cara yang lebih kompeten.

Adanya para dermawan juga memberikan dampak simultan berupa keinginan Tuna Wisma untuk menjadi pengemis. Pengemis dengan sengaja mencari belas kasihan orang lain dengan cara menyewa bayi. Hal tersebut dimaksudkan agar para dermawan menaruh belas kasihan dan memberi uang.

Kurangnya asrama untuk menampung berbagai tuna khususnya Tuna Wisma yang terjaring operasi. Kurangnya kuantitas menyebabkan timbulnya fungsi ganda asrama, yaitu menampung berbagai objek(tuna) dan pada

akhirnya hal tersebut menimbulkan over kapasitas penampungan.

DAMPAK UPAYA PENANGANAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERHADAP KEBERADAAN TUNA WISMA DI SURABAYA MASA WALIKOTA MOEHADJI WIDJAJA

A. Dampak Sosial, Ekonomi dan Psikologis Penanganan Terhadap Keberadaan Tuna Wisma di Surabaya

Melalui upaya penertiban Hasta Tertib, tertib terhadap berbagai tuna terus menerus dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya. Sebab keberadaan tuna khususnya Tuna Wisma dapat mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan umum, terkesan kotor dan bahkan merusak kebersihan dan keindahan Kota Surabaya. Pada tahun 1984 khususnya di tempat-tempat umum di Kota Surabaya nyatanya telah bebas dari adanya keberadaan Tuna Wisma. Perihal konstelasi tersebut, Kabag Kesra KMS drs. Alie Prayitno menyatakan dalam Surabaya Post:

“Mereka yang masih dijumpai di tempat-tempat umum digolongkan pengemis, bekas penderita kusta, bekas penderita sakit ingatan, orang jompo terlantar dan mungkin juga WTS. Semunya ini digolongkan tunakarya, tetapi mungkin bukan tunawisma.”³¹

Keberadaan Tuna Wisma yang terkesan memberikan dampak destruktif seperti keadaan para Tuna Wisma mayoritas yang hidup di jalanan mengakibatkan kondisi dengan berbagai penyakit dan jauh dari kebersihan. Serta adanya paradigma masyarakat yang memandang bahwa kehidupan Tuna Wisma selalu menghindari norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat dan direpresentasikan melalui perbuatan dan tindakan yang menyimpang seperti munculnya tindak kejahatan seperti mencuri, menipu dan lain-lain. Dampak destruktif dari adanya Tuna Wisma nyatanya mampu dikurangi dengan berbagai upaya, salah satunya melalui operasi Hasta Tertib yang memberikan hasil dengan tidak adanya lagi Tuna Wisma yang mangkal di tempat-tempat umum di Kota Surabaya. Jadi dengan telah bebasnya Kota Surabaya dari keberadaan Tuna Wisma, setidaknya secara simultan hal tersebut mampu menimbulkan dampak positif dalam menciptakan keadaan bersih, indah, aman dan tertib di Kota Surabaya. Dari upaya

³⁰ “Wargo Lelono Menghimpun 7.000 Tuna Wisma”, *Surabaya Post*, Jum’at, 27 Januari 1984, hlm: 2

³¹ Surabaya Sudah Bebas Gelandangan, *Surabaya Post*, Kamis, 9 Februari 1984, hlm: 2

represif berupa penertiban Hasta Tertib untuk mengurangi keberadaan berbagai tuna khususnya Tuna Wisma yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya nyatanya mampu memberikan hasil yang cukup terlihat konkrit. Hasil tersebut diperlihatkan ketika di tempat-tempat umum di Kota Surabaya telah bebas dari yang adanya Tuna Wisma, sedangkan yang berkeliaran di tempat umum menurut Kabag Kesra KMS Alie Prayitno adalah Tuna Karya.

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari adanya upaya penanganan Tuna Wisma adalah penyaluran kerja bagi para Tuna Wisma. Berdasarkan narasi pemberitaan surat kabar Surabaya Post, Pemerintah Kota Surabaya yang dibantu oleh organisasi Tuna Wisma "Wargo Lelono" dalam pelaksanaan penanganan keberadaan Tuna Wisma di Surabaya nyatanya mampu menyalurkan Tuna Wisma untuk mendapatkan pekerjaan. Pihak Pemerintah Surabaya memberi pekerjaan untuk 16 Tuna Wisma yang berasal dari 16 lokasi konsentrasi Tuna Wisma untuk menjadi petugas, kemudian diberi honor setiap bulan sejumlah Rp.5.000. Para petugas tersebut ditempatkan di pusat-pusat konsentrasi yang diinisiasi antara pihak pemerintah dengan Wargo Lelono.³² Dalam narasi pemberitaan Surabaya Post terdapat berita tentang hasil dari adanya pelaksanaan program transmigrasi. Dalam narasi tersebut terdapat pemberitaan mengenai transmigran dengan status eks Tuna Wisma di Surabaya yang berhasil sukses dalam program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pihak KMS. Transmigran tersebut bernama Hariyadi Soedjono eks Tuna Wisma di Surabaya.³³

Di luar panti-panti sosial, pihak Pemerintah Surabaya juga membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Animo Transmigrasi KMS untuk memberikan kesadaran untuk bertransmigrasi bagi para Tuna Wisma. Melalui upaya penyadaran tersebut, terdapat para Tuna Wisma yang secara sukarela mengikuti program transmigrasi. Dalam narasi pemberitaan Surat kabar Surabaya Post diberitakan bahwa terdapat keluarga Tuna Wisma yang secara sukarela mengikuti program transmigrasi dari pihak Pemerintah Surabaya. Kesadaran diri untuk mengikuti program Transmigrasi ditunjukkan oleh keluarga Tuna Wisma yang bernama Soegianto. Hal tersebut ditunjukkan pasca hunian liar miliki Soegianto yang berada di stren kali Grege dibongkar petugas. Dalam Surabaya Post dijelaskan bahwa:

"Ia sudah mantap membayangkan "tanah air" baru di sebuah proyek transmigrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Semuanya Sudah ditanggung Pemerintah. Kita harus menerima program transmigrasi, daripada lontang-lantung tak punya tempat tinggal." Ujarnya seperti mengingatkan".³⁴

Terlihat dari ungkapan keluarga Soegianto tersebut bahwa keluarga Soegianto secara sukarela lebih memilih untuk bertransmigrasi dari hidup menggelandang tidak memiliki hunian. Nyatanya hidup sebagai gelandangan di perkotaan dan menempati hunin-hunian liar akan selalu dikejar-kejar oleh petugas-petugas penertiban. Oleh karena itu Soegianto secara sadar lebih memilih untuk mencari kehidupan baru agar nantinya diharapkan dengan memiliki kehidupan baru mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang turut mendukung dan membantu pembangunan negara.

Pada bulan juni 1984 merupakan masa akhir kepemimpinan Drs. Moechadji Widjaja, namun tampaknya mendekati masa tersebut yaitu pada awal tahun 1984 perihal upaya penanganan Tuna Wisma di Kota Surabaya memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Dari adanya berbagai pelaksanaan penanganan Tuna Wisma di Kota Surabaya semasa kepemimpinan Walikota Drs. Moechadji Widjaja memperoleh hasil yang cukup signifikan. Hasil yang diperlihatkan yaitu adanya penurunan jumlah Tuna Wisma di Kota Surabaya dan bebasnya tempat-tempat umum di Kota Surabaya dari keberadaan Tuna Wisma. Hasil penurunan jumlah Tuna Wisma terlihat pada pemberitaan surat kabar Surabaya Post mengenai penurunan jumlah Tuna Wisma pada tahun 1980 hingga awal tahun 1984.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kota Surabaya yang terkenal dengan sebutan kota Indamardi (Industri, Perdagangan, Maritim dan Pendidikan) mampu menarik perhatian golongan penduduk tertentu untuk datang dan menetap, terutama bagi golongan penduduk yang ingin mencari pekerjaan dan ingin melanjutkan pendidikan. Penampilan Kota Surabaya yang semakin berkembang pada akhirnya menjadikan daya tarik dan menimbulkan dampak sosial berupa tingginya migrasi migran dari berbagai daerah untuk masuk ke Kota Surabaya. Layaknya kota-kota besar lain di Negara Berkembang, Kota Surabaya menerima konsekuensi

³² *Opcit*, hlm: 2

³³ "Bekas Penganggur Jadi Petani Teladan", *Surabaya Post*, Rabu, 15 Mei 1981, hlm: 2

³⁴ "Soegianto Memilih Bertransmigrasi", *Surabaya Post*, Rabu, 17 November 1982, hlm: 2

dengan adanya peningkatan jumlah migran yang mencoba mengadu nasib di kota terbesar kedua di Indonesia tersebut. Serta juga mengakibatkan semakin tidak seimbangnya daya dukung kota dikarenakan penambahan jumlah migran yang sangat tinggi.

Proses urbanisasi berupa migrasi pada dasarnya juga memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota dalam dua hal, yakni penawaran kerja dan permintaan kerja. Peristiwa migrasi yang terjadi di Kota Surabaya menimbulkan beberapa fenomena yaitu tidak seimbangnya struktur penawaran kerja dan permintaan kerja di antara Kota Surabaya dengan daerah para migran. Pada sisi penawaran kerja, urbanisasi secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di kota yang melampaui tingkat atau batasan pertumbuhan penduduk dan kehadiran para pendatang tersebut cenderung melipatgandakan tingkat penawaran kerja di kota. Pada sisi permintaan kerja, Kota Surabaya sebagai salah satu kota dengan di kemajuan berbagai sektor mengakibatkan permintaan kerja sektor formal di perkotaan lebih sulit dan mahal. Pada kenyataannya ketersediaan lapangan pekerjaan (formal) Kota Surabaya tidak seluruhnya dapat diserap oleh para pendatang tersebut dikarenakan banyak dari migran yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan.

Semakin padatnya penduduk Kota Surabaya menyebabkan pula penyempitan lahan hidup bagi penduduk Kota Surabaya. Semakin menipisnya lahan hidup, menjadikan harga lahan atau ruang hidup relatif menjadi lebih tinggi. Bagi penduduk Kota Surabaya khususnya para pendatang yang tidak memiliki pekerjaan, hal tersebut membuat para pendatang tidak memiliki kesempatan bersaing untuk memiliki lahan hidup (rumah). Mayoritas para migran di Kota Surabaya tidak memiliki lahan hidup dikarenakan tidak memiliki pekerjaan, sehingga para migran yang tidak kompetitif tersebut termarginalisasi dari struktur dan lingkungan masyarakat Kota Surabaya. Keberadaan para migran yang tidak memiliki hunian tersebut pada akhirnya memunculkan suatu kelompok sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bernama Tuna Wisma.

Tuna Wisma di Surabaya pada tahun 1980 berasal dari daerah sekitar kota Surabaya, antara lain Kota Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Kediri dan lain-lain. Pola mata pencaharian Tuna Wisma di Surabaya pada umumnya yaitu memiliki pekerjaan yang berdekatan dengan permukiman mereka, seperti contohnya sebagai pemulung, pengemis, tukang becak dan makelar penumpang di terminal. Masifnya keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya terlihat pada semakin banyaknya kemunculan

permukiman liar yang berada berdekatan dengan fasilitas publik. Keberadaan permukiman liar Tuna Wisma di Surabaya pada umumnya berada di Stasiun Trem Wonokromo, Makam Tembok Surabaya dan berada di stren sungai Kalimas, sungai Undaan dan lain-lain. Keberadaan permukiman liar yang kumuh dan tidak sehat memberikan dampak destruktif berupa terganggunya keamanan, ketertiban dan kebersihan Kota Surabaya, sehingga pada tahun 1980 pihak Pemerintah Kota Surabaya mulai memberikan atensi khusus terhadap Tuna Wisma dengan mengadakan sensus khusus Tuna Wisma. Kemudian setelah itu mulai diadakan berbagai upaya penanganan untuk menekan keberadaan dan mengurangi jumlah Tuna Wisma di Surabaya.

Pelaksanaan penanganan Tuna Wisma oleh Pemerintah Kota Surabaya dibawah kepemimpinan Drs. Moehadji Widjaja pada tahun 1980-1984 terdapat tiga orientasi, antara lain: Upaya Preventif, Upaya Represif dan Upaya Rehabilitatif. Tiga orientasi penanganan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Upaya Preventif dilakukan untuk mencegah kemunculan Tuna Wisma di Surabaya, contoh dari kegiatan tersebut adalah adanya penyuluhan keterampilan kerja bagi pemuda putus sekolah dan penyandang cacat di Surabaya. Upaya Represif dilakukan untuk menekan dan mengurangi jumlah Tuna Wisma di Surabaya, contoh dari upaya tersebut adalah pengadaan operasi Tri Tuna yang diadakan untuk menertibkan Tuna Wisma yang berkeliaran di tempat-tempat umum di Surabaya dan penertiban bangunan-bangunan liar milik Tuna Wisma yang berada di zona-zona publik. Upaya Rehabilitatif dilakukan sebagai upaya lanjutan dari upaya represif, contoh dari upaya tersebut adalah penyuluhan keterampilan bagi Tuna Wisma Barak Bapertukda dan pemberangkatan dalam program Transmigrasi.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan penanganan terhadap keberadaan Tuna Wisma selama kurun waktu 1980-1984, antara lain: 1.) fasilitas yang kurang memadai dikarenakan terjadi kelebihan kapasitas; 2.) adanya tindakan para dermawan yang kurang edukatif; 3) adanya paradigma Tuna Wisma untuk lebih memilih hidup menggelandang dengan bermata pencaharian menjadi pengemis.

Dalam pelaksanaan berbagai upaya penanganan Tuna Wisma di kota Surabaya mampu memberikan dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi Tuna Wisma di kota Surabaya. Dampak sosial yang dihasilkan adalah terciptanya kondisi kota Surabaya yang bersih dan indah,

terciptanya keamanan dan ketertiban kota dan membentuk atau membangun rumah tangga. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari berbagai upaya penanganan Tuna Wisma adalah adanya penyaluran kerja bagi Tuna Wisma dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dampak psikologis yang dihasilkan adalah kesadaran bagi tiap individu Tuna Wisma untuk secara sukarela mengikuti program Transmigrasi.

B. Saran

Penelitian yang berjudul Penanganan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan Tuna Wisma di Kota Surabaya 1980-1984 ini dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah, organisasi-organisasi sosial, maupun masyarakat pada umumnya di masa kini maupun masa yang akan datang.

Fenomena mengenai keberadaan Tuna Wisma telah menjadi permasalahan nasional yang dihadapi di berbagai kota. Penanganan dengan berbagai upaya untuk memecahkan masalah sosial perkotaan mengenai keberadaan Tuna Wisma menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah, yang mana pemerintah di suatu perkotaan tersebut merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan sosial perkotaan tersebut. Tuna Wisma yang notabene juga sebagai salah satu elemen masyarakat kota yang mengalami proses marginalisasi juga diharapkan mampu memiliki peluang untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Organisasi sosial merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Memiliki fungsi sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Organisasi sosial yang menginisiasi perihal penanganan keberadaan Tuna Wisma seperti asrama penampungan dan Panti Wreda, sehingga peran berbagai organisasi sosial tersebut nantinya menjadi jembatan dari individu untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai. Organisasi sosial juga harus memiliki kesadaran bahwa organisasi sosial adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi para Tuna Wisma, melindungi hak Tuna Wisma dan memberikan upaya peningkatan kesejahteraan bagi Tuna Wisma melalui upaya perluasan kesempatan kerja.

Keberadaan kelompok sosial secara kooperatif mampu membantu pihak pemerintah setempat dalam upaya penyelesaian masalah-masalah sosial semisal keberadaan Tuna Wisma di kota tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin relasi dengan berbagai organisasi sosial, sehingga hal ini nantinya berdampak simultan pada

keefektifan berbagai upaya penanganan perihal keberadaan Tuna Wisma di suatu perkotaan.

Perihal upaya penanganan Tuna Wisma yang bersifat represif seperti adanya razia dan operasi penertiban dirasa kurang memberikan dampak yang kurang efektif. Secara instan memang pelaksanaan upaya tersebut memberikan dampak eksplisit berupa pengurangan keberadaan jumlah Tuna Wisma yang berada di tempat-tempat umum suatu kota, namun upaya tersebut nyatanya tidak mampu menjamin bagi para Tuna Wisma untuk kembali hidup menggelandang jika pasca terjaring operasi tidak dilakukan upaya lanjutan berupa upaya rehabilitatif. Oleh karena itu upaya rehabilitatif berupa pemberian motivasi, pembinaan yang efektif dan mengajak mengikuti program pemerintah seperti transmigrasi seyogianya lebih diprioritaskan dikarenakan penanganan tersebut mampu menjadi tindakan pencegahan bagi Tuna Wisma untuk tidak kembali hidup menggelandang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip:

Arsip Kota Surabaya Nomor: 63.843/ Box: 1707, mengenai Instruksi Walikotamadya tentang Pelaksanaan Operasi TRI TUNA di wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya

Arsip Kota Surabaya Nomor: 47.481/ Box: 864.866, mengenai pengajuan bantuan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bina Guna DEPNAKERTRANS Propinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan Kursus Keterampilan Tukang Batu untuk Tuna Karya

Arsip Kota Surabaya Nomor: 63.843/ Box: 1707, mengenai Instruksi Walikotamadya tentang Pelaksanaan Operasi TRI TUNA di wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya

Arsip Kota Surabaya Nomor: 47.481/ Box: 864.866, mengenai pengajuan bantuan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bina Guna DEPNAKERTRANS Propinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan Kursus Keterampilan Tukang Batu untuk Tuna Karya

Surabaya Dalam Lintas Pembangunan, (Sub Bagan Humas dan Protokol Kotamadya Darah Tingkat II Surabaya, 1980)

B. Surat Kabar dan Majalah:

Surabaya Post, "Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Rep. Indonesia No. II/MPRS/1960", 6 Desember 1960 Tahun ke-VIII No. 105

Surabaya Post, "Surabaya Barometer Perdagangan di Jatim", 5 Juni 1980

Surabaya Post, "Pelamar Meluap", Kamis, 26 November 1980

Surabaya Post, "Surabaya Kewalahan Mengatasi Urbanisasi", Jum'at, 21 November 1980

Surabaya Post, "Sensus Sudah Mencapai Sepertiga Penduduk Jatim: Khusus Gelandangan 31 Oktober Tengah Malam", 2 Oktober 1980

Surabaya Post, "Jl. Semarang Dikotori Gubuk Gelandangan", 13 September 1980, hlm: 2

Surabaya Post, "Bekas Penganggur Jadi Petani Teladan", Rabu, 15 Mei 1981

Surabaya Post, "Soegianto Memilih Bertransmigrasi", Rabu, 17 November 1982

Surabaya Post, "Perlu Pendekatan, Prems dan Bakotas", 3 Februari 1982

Surabaya Post, "Rumah Sepanjang Rel Segera Ditertibkan", Jum'at, 1 Oktober 1982

Surabaya Post, "Jumlah Gelandangan Direm", Kamis, 2 Desember 1982

Surabaya Post, "Anak-anak Tuna Wisma Didata", Sabtu, 5 Mei 1984

Surabaya Post, "Wargo Lelono Menghimpun 7.000 Tuna Wisma", Jum'at, 27 Januari 1984

Surabaya Post, "Surabaya Sudah Bebas Gelandangan", Kamis, 9 Februari 1984

C. Buku:

Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*, Surabaya: University Press

Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Freek Colombijn, dkk. 2005, *Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak

Jan Luiten van Zanden, Daan Marks, 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia

Mas'ood Mochtar.1989. *Ekonomi dan Strukur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3S

Sugiono Soetomo. 2009. *Urbanisasi dan Morfologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sukirno, Sadono. 2000." *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*". Jakarta: Raja Grafindo Persada

Todaro M.P, Stephen C. Smith. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.*, Jakarta: Penerbit Erlangga

D. Jurnal Online

Lucy Dyah Hendrawati. 2005. *Identifikasi Masalah Dan Kendala Penanganan Pengemis dan Gelandangan Di Surabaya*. Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga

Rachmat Jumali. 2014. *Wong Mbambung Surabaya 1966-1975*, (Online), AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 2, No. 3, Oktober 2014 <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/tag/9166/wong-mbambung>. Diunduh pada 30 Desember 2015